

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Simpulan**

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan di kota Mataram, Padang, Balikpapan, Manado dan Merauke, maka penelitian ini menyimpulkan:

- a. Dari penelitian di 5 kota diperoleh hasil bahwa SDM yang menyelenggarakan kegiatan PKBN yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian masih belum terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 2 (Hasil Penilaian Kualitas SDM Pendidikan Kesadaran Bela Negara) dimana kota Mataram dan Padang menunjukkan hasil yang sudah mencapai nilai optimal, sedangkan di kota Balikpapan, Manado dan Merauke masih jauh dari nilai rata-rata yang ditetapkan. Hal ini sebagai akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011, tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di daerah, yang memberikan otonomi yang luas terhadap lembaga, instansi, kementerian-kementerian lain dan Pemprov di luar Kemenhan tanpa adanya penyalarsan yang diperlukan dengan Kemenhan RI terutama di bidang SOP.
- b. Dari hasil wawancara mendalam dan FGD dengan SDM peserta PKBN dan penyelenggara PKBN untuk mengetahui persepsi tentang cara pandang dan kurikulum yang sama dalam pelaksanaan Pendidikan Kesadaran Bela Negara dirasa masih terdapat perbedaan. Kondisi ini terlihat dengan terjadinya *trend* penurunan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang signifikan yakni mendekati nol di tahun 2019 sesuai gambar 7 berdasarkan pemodelan. Hal tersebut juga bersesuaian dengan hasil penelitian di lapangan yang masih terdapat daerah yang hanya melaksanakan Penyelenggaraan Bela Negara secara tidak penuh. Sementara Penyelenggaraan Bela Negara tercermin dalam nilai rata-rata rasio Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Kesadaran Bela Negara yang terukur di kota Mataram, Padang, Balikpapan, Manado dan Merauke, yang baru mencapai 65,70%,

bersesuaian dengan kondisi Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Kesadaran Bela Negara di level 2 (kurang baik).

- c. Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidik Kesadaran Bela Negara untuk masyarakat Indonesia bagian Timur (Merauke) jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidik Kesadaran Bela Negara masyarakat di Indonesia bagian Barat. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidik Kesadaran Bela Negara di Merauke tersebut dipengaruhi beberapa faktor penyebab dan umumnya bersifat mendasar yakni tingkat pendidikan masyarakat dan kesejahteraan yang masih rendah (Indeks Pembangunan Manusia, IPM Papua terendah seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Sumatera Barat (Minangkabau) dan sejumlah daerah di Jawa bahwa peran tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama-sama dengan aparat pemerintah sangat intens mendorong masyarakat untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kesadaran bela negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi penentu dalam setiap pengambilan keputusan dalam kelompok masyarakatnya secara demokratis dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

## **V.2 Saran**

- a. Untuk meningkatkan nilai Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Kesadaran Bela Negara sampai ke tingkat 80,15 % di tahun 2025, pada 2017 pemerintah harus : Mengefektifkan (level 4) Kinerja SDM Lembaga Bina Bela Negara, dengan mendorong dan mengawasi serta memastikan hasil atau tingkat keberhasilan SDM lembaga PKBN selama periode waktu tertentu untuk mencapai sasaran terbentuknya sikap mental dan karakter bela negara pada seluruh warga negara Indonesia, secara efektif. Meningkatkan kompetensi SDM pembina bela negara yang cukup baik (level 3), dengan menyiapkan SDM dan menyediakan pendidikan terhadap pembina/kader bela negara yang cukup memadai. Serta didukung dengan Anggaran Bina Bela Negara secara cukup memadai (level 3), dengan menyiapkan dan menyediakan anggaran

Biaya yang dialokasikan oleh pemerintah RI untuk penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara, secara cukup memadai.

- b. Perlu penyusunan SOP, protap atau apapun yang dapat mengintegrasikan sistem penyelenggaraan Bela Negara dengan sosialisasi yang intensif dan efektif. Untuk itu perlu *MoU* yang dapat memberikan jaminan bagi penyelenggaraan Bela Negara ke depan.
- c. Perlu penyusunan sistem kurikulum bersama (antar Kementerian) sehingga dapat terwujudnya standar Bela Negara yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pihak terkait.
- d. Perlunya sistem kontrol (*check and balance*) yang dapat memberikan jaminan terlaksananya PKBN dengan seefektif mungkin.
- e. Perlunya penyempurnaan pelaksanaan bela negara khususnya di kota-kota yang rata-rata nilai Bela Negaranya masih di bawah nilai Standar Optimal Akseptabilitas seperti di kota Manado dan Merauke.

